



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1A /SEK/KU.04.2/01/2018 2 Januari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga lembar
Hal : Pemberitahuan tentang Tata Cara Pembayaran / Penyetoran PNPB secara Elektronik terkait Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar Tahun 2018

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung RI seluruh Indonesia;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Mahkamah Agung RI seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran / Penyetoran PNPB dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Kep- 658/PB/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Kep-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen akun pada Bagan Akun Standar bahwa mulai tanggal 1 Januari 2018, seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya agar dalam melakukan pembayaran/penyetoran PNPB dan PNPB lainnya secara Elektronik supaya menggunakan segmen akun yang baru sesuai dengan lampiran pada surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut diatas (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, PNPB yang diterima di tahun 2017 yang belum disetorkan dan penyetorannya dilakukan pada Tahun 2018, maka akun yang digunakan adalah akun baru, namun untuk PNPB yang sudah disetor pada Tahun 2017 maka akun yang digunakan pada Pembukuan ataupun Pelaporannya tetap menggunakan akun yang lama.

Kepada satuan kerja yang namanya terdaftar pada hasil catatan reuiu Badan Pengawasan pada Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan III sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 837/SEK/KU.04.2/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan Nomor: 1041/SEK/KU.04.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017, agar segera menindaklanjuti dan diharapkan tidak timbul kesalahan akun lagi dimasa mendatang, terutama akun yang bukan Tugas Pokok dan Fungsinya Mahkamah Agung pada Laporan Keuangan Semester II atau Triwulan IV. Bagi satuan kerja yang telah menindaklanjuti agar segera melakukan perubahan di Aplikasi Saiba maupun di Aplikasi E-Rekonnya masing-masing.

Demikian agar Pimpinan masing-masing satuan kerja menyampaikan pemberitahuan ini kepada para pelaksana (Pengelola PNPB) yang berada dibawahnya untuk melaksanakan dan mematuhi sesuai Peraturan yang berlaku, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI

Lampiran Pemberitahuan tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNPB secara Elektronik terkait Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar Tahun 2018

Nomor : 1 A /SEK/KU.04.2/01/2018
Tanggal : 2 Januari 2018

PEMUTAKHIRAN SEGMENT AKUN PNPB

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan Akun	Jenis Akun
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah negara, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya*	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum
4	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum
5	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum
6	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya*	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum

7	425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang*	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengelolaan barang pada pengelola barang selain yang berasal dari KKKS, Kontraktor PKP2B, aset eks BLBI dan aset bekas milik asing/Tionghoa.	Umum
8	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengesahan surat di bawah tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung(BA 005).	Fungsional
9	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005).	Fungsional
10	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari ongkos perkara. Masuk Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005), Kejaksaan Agung (BA 006), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (093).	Fungsional
11	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kejaksaan dan peradilan lainnya, antara lain berupa pendaftaran pengangkatan sita, hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil orang yang berhak, hasil pemulihan kerugian negara, hasil kerjasama di bidang hukum dengan negara lain, sisa panjar biaya perkara, dan hak redaksi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Mahkamah Agung (BA005).	Fungsional
12	425719	Pendapatan Bunga Lainnya*	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga selain yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya.	Umum
13	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)*	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.	Umum
14	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penutupan rekening pemerintah.	Umum

15	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.	Umum
16	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.	Umum
17	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.	Umum
18	425811	Pendapatan Penyelesaian Denda Pemerintah Pekerjaan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum
19	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum
20	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum
21	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum

22	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai PNS yang sudah pensiun.	Umum
23	425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Pejabat Negara yang sudah pensiun.	Umum
24	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	Umum